

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara ini memberikan informasi dan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis yang tercantum pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 : Terciptanya peningkatan kesempatan kerja,**

Kinerja sasaran ini diukur berdasarkan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan target 74 persen. TPAK Tahun 2023 sebesar 72,94 persen sedangkan TPAK tahun 2025 Belum di terbitkan oleh BPS.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan**

Kinerja sasaran ini diukur berdasarkan indikator kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB dengan target 18 persen. PDRB sektor perdagangan Tahun 2023 adalah sebesar 18,37 persen sedangkan PDRB Tahun 2025 belum diterbitkan oleh BPS.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah**

Kinerja sasaran ini diukur berdasarkan indikator Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dengan target 18 persen. Jumlah Pelaku IKM terdata Tahun 2023 adalah sebanyak 734 pelaku usaha sedangkan Jumlah IKM terdata pada Tahun 2025 adalah sebanyak 821 pelaku usaha atau bertumbuh sebesar 11,85%, sehingga capaian sasaran 3 adalah sebesar 94,79%.

4. **Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah**

Kinerja sasaran ini diukur berdasarkan indikator Nilai AKIP yang dinilai oleh Inspektorat Daerah, dengan target nilai BB (skor 74,00). Realisasi nilai BB (skor 71,27) dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 96,31 persen.

Realisasi anggaran belanja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 9.065.287.929,00 dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 9.601.606.273,00 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 94,41%. Sehingga Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 536.318.344 ,00 atau 5,39%.

Capaian realisasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis yang tercantum pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 : Terciptanya peningkatan kesempatan kerja,**

Anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp 3.825.976.229. Realisasi anggaran sebesar Rp 3.592.029.996 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 93,89 persen.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan**

Anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp 610.650.000. Realisasi anggaran sebesar Rp 606.746.590 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 99,36 persen.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah**

Anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp 113.350.000. Realisasi anggaran sebesar Rp 113.150.000 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 99,82 persen.

4. **Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah**

Anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp 5.051.630.044. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.753.361.343 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 94,10 persen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dapat tersusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Batu Bara. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan (akuntabilitas) kinerja, sehingga informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun, dan keberhasilan pencapaian kinerja yang diuraikan dalam laporan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun, sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.

Demikianlah laporan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dimasa yang akan datang, dan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih.

Talawi, 10 Januari 2025
Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Batu Bara

Antoni Ritonga, S.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19690529 199303 1 005

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	5
1.5. Isu Strategi yang Dihadapi OPD	6
1.6. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.2. Indikator Kinerja Utama	10
2.3. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Pengukuran Kinerja	13
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.3. Analisis Capaian Kinerja	17
3.4. Realisasi Anggaran	30
3.5. Analisis Efisiensi	33
BAB IV PENUTUP	35
FOTO FOTO DOKUMENTASI	37
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 72 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, peran Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 . Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara selama tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 72 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di dinas ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta visi dan arah pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan kepada sekretaris para kepala bidang dan unit pelaksana teknis agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, bidang 6 perindustrian serta bidang perdagangan dan kemetrolagian;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala unit kerja di lingkungan sekretariat para kepala bidang dan unit pelaksana teknis untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Struktur Organisasi

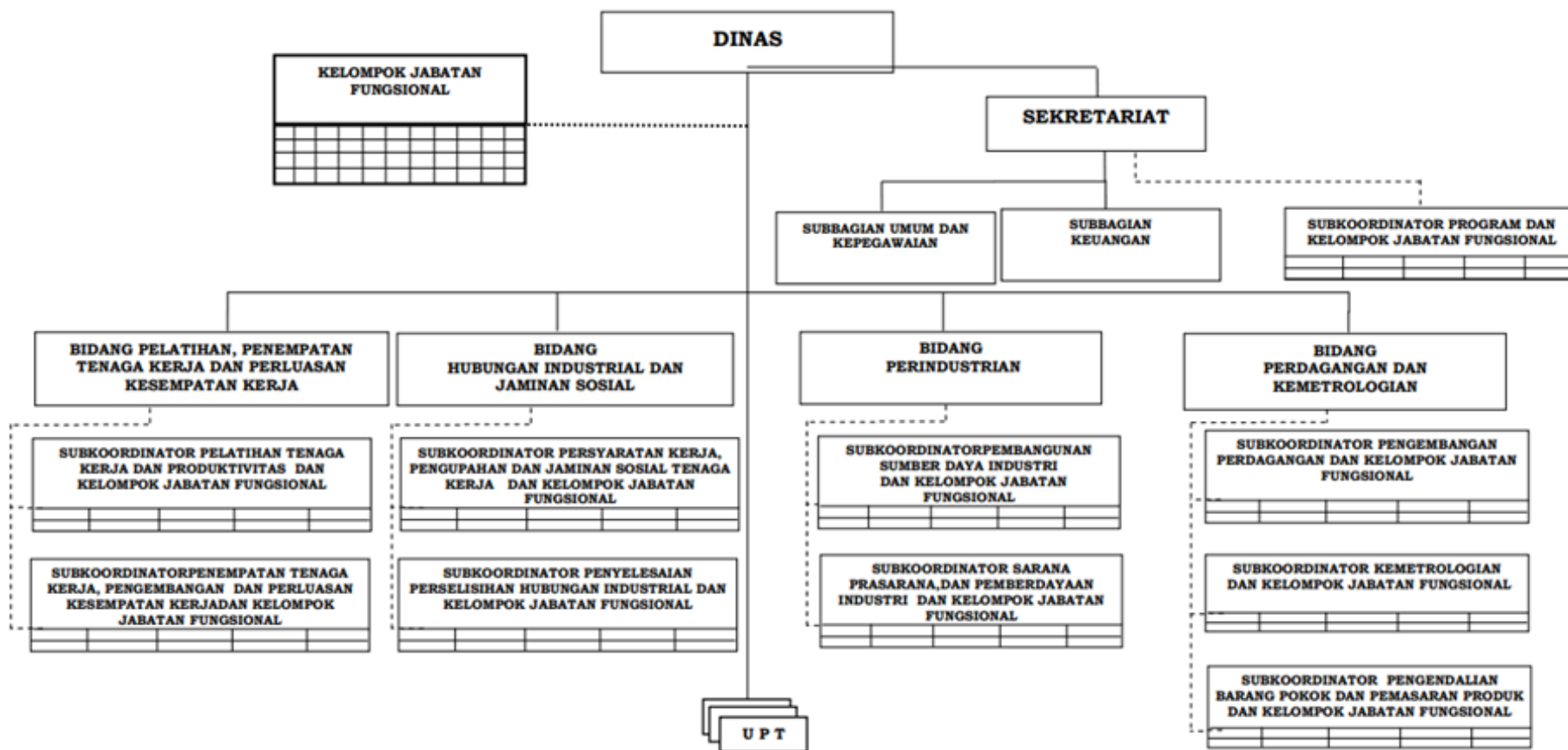
Adapun struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara No. 72 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbag Umum;
 2. Subbag Keuangan
 3. Subkoordinator Program
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pelatihan Tenaga Kerja Dan Produktivitas
 2. Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja, Pengembangan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial, Terdiri dari:
 1. Subkoordinator Persyaratan Kerja, Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 2. Subkoordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Subkoordinator Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri
 2. Subkoordinator Pembangunan Sumber Daya Industri
- f. Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Pengembangan Perdagangan
 2. Subkoordinator Pengendalian Barang Pokok dan Pemasaran Produk
 3. Subkoordinator Kemetrolgian
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.

GAMBAR 1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BATU BARA



1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara didukung oleh personil sebanyak 90 orang (data per akhir Desember 2025). Adapun komposisi jumlah personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	RASIO	KETERANGAN
1.	Aparatur Sipil Negara / ASN	36 orang	56,76%	
2.	Non ASN	54 orang	43,24%	
	Total	90 orang	100%	

Khusus untuk personil PNS, dapat dilihat komposisi berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		ASN	CASN	Non ASN	
1	SMA	2	0	41	43
2	D3	4	0	3	7
3	S1	22	4	10	36
4	S2	4	0	0	4
	Jumlah	32	4	54	90

Dari tabel diatas, komposisi pegawai Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara berdasarkan tingkat pendidikannya sudah cukup ideal.

Komposisi PNS dilihat berdasarkan golongan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	Gol I	0	0	0
2	Gol II	4	0	4
3	Gol III	23	4	27
4	Gol IV	5	0	5
Jumlah		32	4	36

Ke depan diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, kualitas dan kompetensi personil yang ada harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual.

1.5. Isu Strategi Yang Dihadapi OPD

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2025, serta dinamika permasalahan di lapangan, maka permasalahan utama (*strategic issues*) Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dirumuskan antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Ketenagakerjaan

1. Lapangan pekerjaan yang terbatas
2. Masih tingginya angka jumlah pengangguran
3. Rendahnya informasi bursa kerja yang tersedia secara transparan
4. Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan terhadap Wajib Laport Lowongan Pekerjaan
5. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
6. Minimnya perlindungan hukum terhadap kasus ketenagakerjaan

7. Masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri
8. Kualifikasi/ jurusan lulusan pendidikan SMK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

b. Bidang Perindustrian

1. Kapasitas produksi industri kecil menengah masih belum optimal.
2. Pengembangan kualitas produk IKM dan kemasan yang belum maksimal.
3. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.
4. Lemahnya penguasaan desain produk unggulan daerah.
5. Membanjirnya produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif yang mengakibatkan lemahnya daya saing produk
6. Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha industri, perdagangan,
7. Lemahnya kemampuan pelaku usaha industri dan perdagangan dalam mengakses permodalan

c. Bidang Perdagangan

1. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
2. Perlunya peningkatan pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
3. Perlunya peningkatan pelayanan kemetrolgian dengan membentuk UPT Metrologi Legal dan penyediaan sarana dan prasarana
4. Perlunya menjaga stabilisasi harga barang pokok strategis dan barang penting lainnya
5. Rendahnya cakupan binaan kelompok pedagang mikro kecil dan eceran
6. Perlunya penataan dan peningkatan sarana pasar rakyat dan pusat pusat perdagangan;
7. Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi
8. Perlunya peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam upaya perlindungan konsumen.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2025. Dokumen Renstra ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparatur Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi pembangunan yaitu; *“Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya”*. Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam 8 (delapan) misi, dimana Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara mengacu pada misi sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi (Berbudaya)
- b. Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya (Sejahtera)

Selanjutnya berdasarkan dua misi diatas ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan ini didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dan juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sementara itu, untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Adapun hubungan antara visi dan misi Bupati Batu Bara dengan rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2.1. Tabel Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya	Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah dari sektor perdagangan	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah dari sektor perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
		Mengurangi angka pengangguran	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja
	Misi 1 : Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi	Terciptaya reformasi birokrasi perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Batu Bara

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	$(\text{Jumlah angkatan kerja} / \text{Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas} \times 100\%)$	BPS
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	$(\text{Jumlah PDRB Sektor Perdagangan} / \text{Jumlah PDRB Kabupaten}) \times 100\%$	BPS
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	$((\text{Jumlah industri kecil menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil menengah tahun } (n-1)) / \text{Jumlah industri kecil menengah tahun } (n-1)) \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP	Nilai AKIP OPD	Inspektorat

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian

Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	74
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	45.90
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	18
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	nilai	BB(74)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.051.630.044	PAPBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.557.321.229	PAPBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	20.405.000	PAPBD
4	Program Hubungan Industrial	248.250.000	PAPBD
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	375.000.000	PAPBD
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100.000.000	PAPBD
7	Program Pengembangan Ekspor	75.000.000	PAPBD
8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	60.650.000	PAPBD
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	113.350.000	PAPBD
JUMLAH		9.601.606.273	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.

Penghitungan persentase pencapaian rencana kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penilaian

capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Teknik pengumpulan data dan teknik monitoring dan evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Sasaran Strategis Ke - 1 : Terciptanya peningkatan kesempatan kerja				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun ketas}} \times 100\%$	Data eksisting jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas	Recheck data dan perhitungan;koordinasi ke BPS
2	Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian				
	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB Kabupaten}} \times 100\%$	Data eksisting dan perhitungan jumlah PDRB Sektor Perdagangan	Recheck data dan perhitungan;koordinasi ke BPS
3	Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah				
	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah industri kecil menengah tahun n} - \text{Jumlah industri kecil menengah tahun (n-1)}}{\text{Jumlah industri kecil menengah tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data eksisting dan perhitungan jumlah PDRB Sektor Perdagangan	Recheck data dan perhitungan;kunjungan dan pemantauan ke lapangan
4	Sasaran Strategis Ke – 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
	Nilai AKIP OPD	Kualitatif	Nilai	Data Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dari Inspektorat Daerah	Koordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam penilaian akuntabilitas OPD

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74%	NA	NA	NA
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	45.90%	NA	NA	NA
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	18%	11,85%	94,79%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB (74)	BB (71,27)	96,31%	Sangat Tinggi

Ket : BPS belum menerbitkan data PDRB dan ketenagakerjaan Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 masuk dalam kategori sangat baik.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Setelah hasil capaian kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran diperoleh, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Sementara analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis merupakan bentuk pengeksplorasian data hasil pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klarifikasi dari munculnya data itu sendiri. Dalam hal ini, analisis capaian kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun Evaluasi dan Analisis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Sasaran Strategis Ke - 1 : Terciptanya peningkatan kesempatan kerja**

TABEL PERBANDINGAN TAHUN LALU DAN SEKARANG

Terciptanya peningkatan kesempatan kerja diukur dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun dan lebih.

BPS belum menerbitkan data ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, sehingga dalam hal ini dipergunakan Data Ketenagakerjaan Tahun 2023 dengan asumsi bahwa data indeks ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara mengalami perbaikan dari Tahun sebelumnya dengan pertimbangan bahwa indeks ketenagakerjaan Tahun 2023 lebih baik dari Tahun 2022. Sehingga target 2025 dalam hal ini akan dibandingkan dengan data 2023.

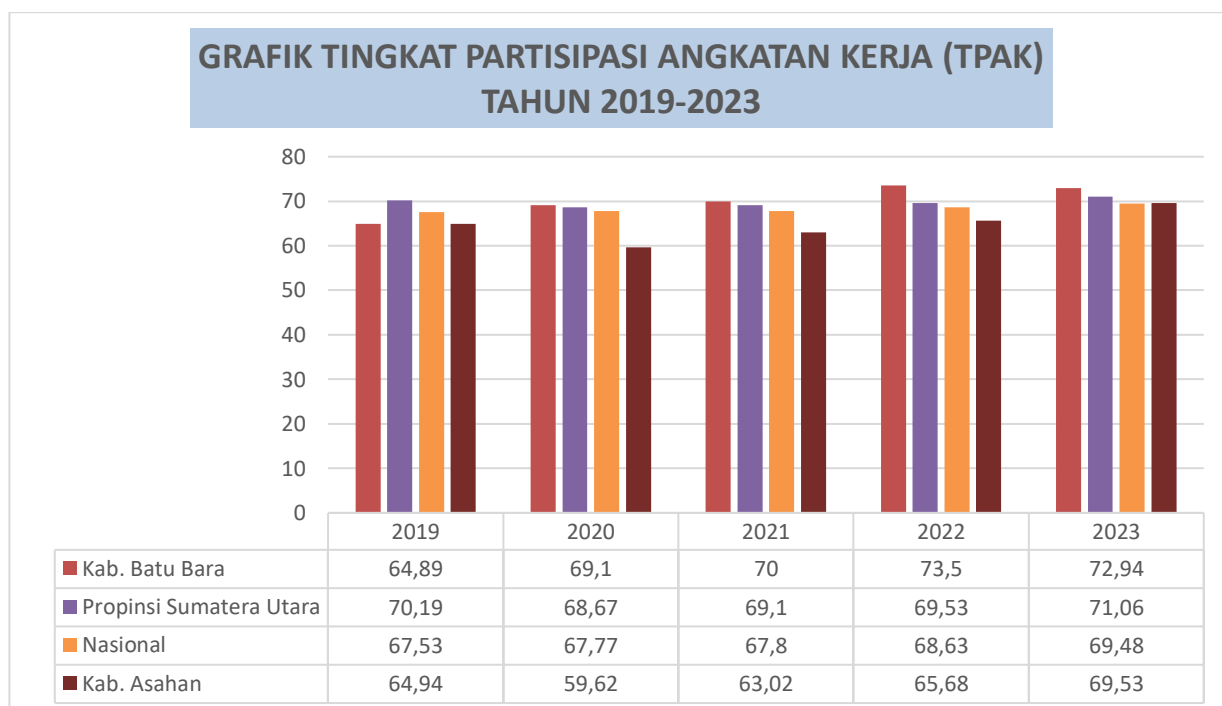
Berdasarkan Buku Statistik Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang diterbitkan BPS Kabupaten Batu Bara, komposisi penduduk usia kerja di kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 pada adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Komposisi Penduduk dan Jenis Kelamin 2023

Komposisi Penduduk	Jumlah Penduduk (jiwa)		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
I. Penduduk usia Kerja	153.498	154.606	308.104
<i>A. Angkatan Kerja</i>	<i>136.453</i>	<i>88.288</i>	<i>224.741</i>
1. Bekerja	129.240	82.297	211.537
2. Pengangguran	7.213	5.991	13.204
<i>B. Bukan Angkatan Kerja</i>	<i>17.045</i>	<i>66.318</i>	<i>83.363</i>
II. % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,29%	6,79%	5,88%
III. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	88,90%	57,11%	72,94%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Batu Bara tahun 2023 sebesar 72,94% yang diperoleh dari jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 224.741 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 308.104 jiwa. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada sebesar 5,88%.

Secara ringkas data realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019-2023 tersaji pada grafik berikut ini.



Dari grafik diatas dapat dilihat realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah sebesar 72,94%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 74%, maka capaian kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah sebesar 98,57%. Pada Tahun 2023 TPAC mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022, hal ini disebabkan oleh Covid-19, tetapi Secara umum grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019 sampai 2023 mengalami pertumbuhan yang positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak Masyarakat pada umur produktif yang bekerja.

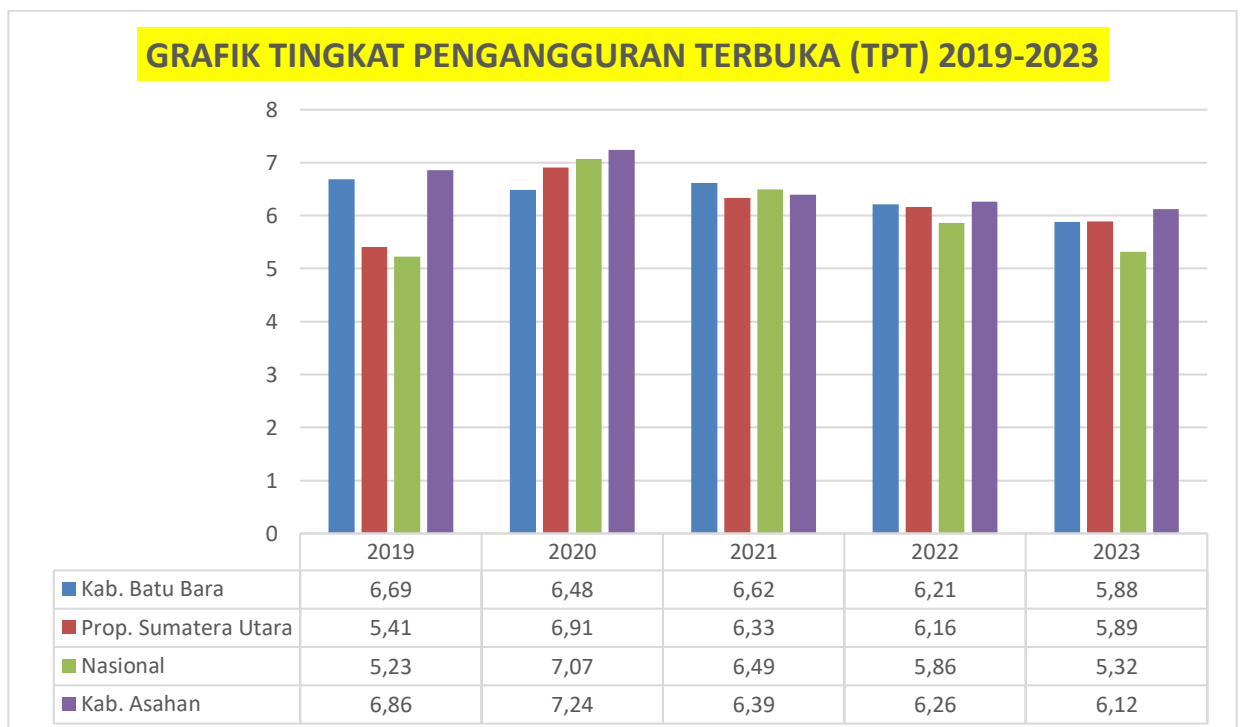
Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi daerah tetangga yakni Kabupaten Asahan sebesar 69,53% dan Propinsi Sumatera Utara dengan realisasi 71,06%.

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Batu Bara juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi secara nasional yakni 69,48.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Di satu sisi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga dipengaruhi oleh jumlah pengangguran yakni penduduk usia kerja yang tidak sedang bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka mencakup (1) mereka yang mencari pekerjaan, (2) mereka yang mempersiapkan usaha, (3) mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laporan kinerja ini juga disajikan angka tingkat pengangguran terbuka karena merupakan bagian dari pencapaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut ini disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023.



Dari grafik diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah sebesar 5,88%. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Asahan sebesar 6,12% dan Propinsi Sumatera Utara dengan realisasi 5,89%. Namun masih di bawah angkar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).tingkat nasional sebesar 5,32%.

Faktor penghambat pencapaian indikator ini antara lain:

- a. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, hal ini ditandai dengan banyaknya lulusan sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang universitas dan tidak seimbang dengan lowongan kerja yang tersedia dan menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru
- b. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga menyebabkan kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai. Bahkan menurut Data BPS menyebutkan bahwa tahun 2023, Jumlah penduduk Batu Bara berusia 15 tahun keatas yang bekerja dengan status tidak/belum pernah sekolah, tidak/belum tamat SD dan hanya tamat sampai SD sederajat ditambah hanya sampai lulusan SLTP , ada sebanyak 114.675 orang dari 211.537 orang penduduk yang bekerja. Persentase kelompok ini mencapai 54,21 %.
- c. Kualifikasi dan kompetensi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja
- d. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Sedangkan Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan penambahan angkatan kerja

SOLUSI ALTERNATIF

ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

- b. **Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian**

Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian diukur dari capaian kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten.

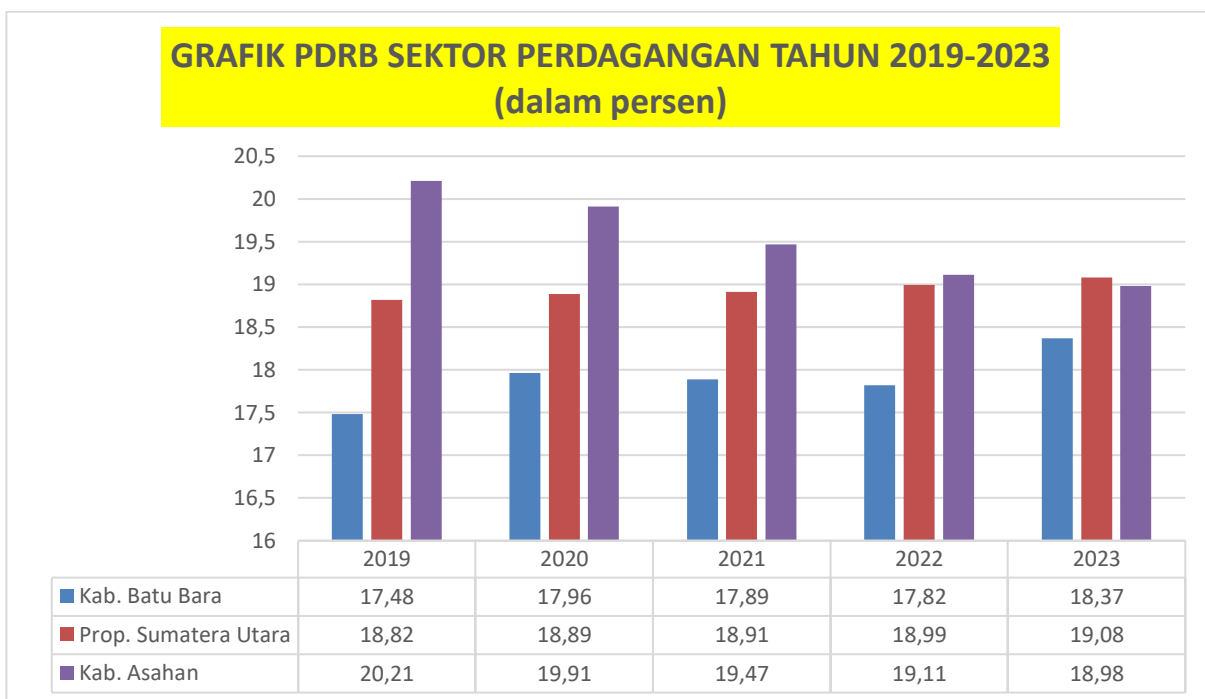
Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Kabupaten Batu Bara menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 17 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dalam hal ini perhitungan PDRB yang dipakai adalah PDRB atas harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, kontribusi PDRB sektor perdagangan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Dari grafik diatas dapat dilihat realisasi Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah sebesar 18,37%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 18%, maka capaian kinerja kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB sebesar 102,06%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 17,82%, pencapaian tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 0,55 poin menjadi 18,37%. Atau naik sebesar 3,09%. Tren peningkatan ini cukup baik mengingat kecenderungan penurunan realisasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai akibat dampak pandemi COVID 19.

Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di Renstra sebesar 18,80%, realisasi tahun 2023 belum dapat mencapai target. Capaian realisasi terhadap renstra adalah 97,71%

Dibandingkan dengan daerah lain, realisasi ini masih sedikit bawah pencapaian daerah tetangga yakni Kabupaten Asahan sebesar 18,98%. Demikian juga halnya bila dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara dengan realisasi 19,08%.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja untuk indikator ini antara lain adalah:

1. Faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini antara lain :
 - b. belum maksimalnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan khususnya pasar rakyat
 - c. tingginya fluktuasi harga barang pokok dan barang penting kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi inflasi daerah dan daya beli masyarakat
 - d. belum optimalnya pelaksanaan peningkatan tertib niaga dan tertib ukur karena terbatasnya anggaran operasional pelayanan dan SDM penera dan pengawas penera alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- a. Merevitalisasi sarana dan prasarana pasar tradisional
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan pasar tradisional.
- c. Melakukan monitoring dan pemantauan harga barang pokok kebutuhan masyarakat
- d. Melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga barang pokok dan barang strategis kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur serta pengawasan kemetrolagian dalam upaya peningkatan tertib niaga dan tertib ukur

c. Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Berdasarkan Permenperin Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, dinyatakan pada pasal 3 bahwa defenisi Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sementara pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Industri Menengah adalah industri yang memenuhi ketentuan mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi Rp. 1.000.000.000 (satu

milyar) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)

Sasaran meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah diukur dari capaian persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah. Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Batu Bara dan laju pertumbuhannya tersaji pada grafik berikut ini :



Dari grafik diatas dapat dijelaskan pada tahun 2025 terdapat kenaikan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) sebanyak 87 Pelaku IKM dibanding tahun 2023 atau tumbuh sebesar 11,85%.

Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 18%, maka capaian kinerja Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah adalah sebesar 94,79%. Pencapaian persentase pertumbuhan Industri kecil dan menengah Tahun 2025 tidak mencapai target pertumbuhan yaitu sebesar 18%, tetapi secara keseluruhan pertumbuhan IKM di Kabupaten Batu Bara semakin meningkat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain adalah :

- a. Kurangnya permodalan pelaku Industri Kecil dan Menengah
- b. Kurangnya kemampuan skill dan kemampuan teknis pelaku IKM
- c. Kurangnya akses pelaku IKM untuk memasarkan produknya
- d. Kurangnya kreatifitas dan inovasi pelaku Industri Kecil dan Menengah
- e. Kurangnya penggunaan teknologi dan peralatan produksi yang efektif dan efisien

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah antara lain adalah :

- a. Bahan baku yang cukup memadai
- b. Tenaga kerja yang cukup potensial .

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- a. Memfasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas industri kecil menengah dari sisi akses permodalan, kompetensi SDM, teknologi dan peralatan produksi maupun pemasaran produk IKM.
- b. Melakukan pendampingan dalam permasalahan proses produksi IKM

d. Sasaran Strategis Ke - 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dari capaian Nilai AKIP OPD yang dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara. Pengukuran terhadap Nilai AKIP OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan kategori BB (Baik) dengan nilai sebesar 71,27 (Tujuh Puluh Tiga Koma Delapan Pulluh Lima) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Penilaian Akuntabiitas Kinerja Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	24,79
2	Pengukuran Kinerja	30	18,93
3	Pelaporan Kinerja	15	11,69
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,87
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,27
Predikat			BB

Tabel 3.6. Data Nilai AKIP OPD Disnaker Perindag Tahun 2022-2025

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2025
Nilai AKIP OPD	B (67,55)	BB (73,85)	BB (71,27)

Nilai AKIP OPD Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah BB dengan skor 71,27, menurun dibandingkan Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena komponen pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih memiliki nilai yang relative rendah. Sehingga sangat di perlukan perbaikan terhadap komponen tersebut.

Beberapa catatan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara antara lain :

1. Tidak terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja
2. Belum terdapat cross cutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang atau dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
3. Belum terdapat SOP pengumpulan data kinerja
4. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
5. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional

6. Laporan Kinerja belum dipublikasikan
7. Realisasi kinerja skala nasional / internasional pada Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan belum membandingkan dengan level nasional
8. Masih kurangnya informasi efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada Laporan Kinerja
9. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan SDM yang memadai
10. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memanfaatkan teknologi informasi

Beberapa hasil penilaian, Inspektorat Kabupaten Batu Bara merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja
2. Membuat cross cutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang atau dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
3. Membuat SOP pengumpulan data kinerja
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja
5. Mengimplementasikan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
6. Membuat dokumentasi yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
7. Mempublikasikan Laporan Kinerja
8. Menginformasikan ada/tidak realisasi kinerja skala nasional /internasional pada Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan ke dalam Laporan Kinerja
9. Mengikuti sosialisasi maupun pelatihan agar terciptanya SDM yang memadai dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
10. Memanfaatkan teknologi informasi dalam evaluasi akuntabilitas internal

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai kinerja indikator ini didukung oleh program kegiatan yang telah dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Tahun 2025	
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	TERCIPTANYA PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.557.321.229	3.415.008.996
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.016.571.229	1.879.258.996
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	851.041.229	774.110.011
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.165.530.000	1.105.148.985
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.540.750.000	1.535.750.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.540.750.000	1.535.750.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	20.405.000	20.405.000
		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	20.405.000	20.405.000
		Pelayanan antar Kerja	20.405.000	20.405.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	248.250.000	156.616.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	248.250.000	156.616.000
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.100.000	39.090.000
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	48.950.000	46.150.000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	151.200.000	71.376.000
Total Sasaran I			3.825.976.229	3.592.029.996

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Tahun 2025	
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BAGI PEREKONOMIAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	375.000.000	375.000.000
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	375.000.000	375.000.000
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	375.000.000	375.000.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100.000.000	99.700.000
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100.000.000	99.700.000
		Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.000.000	99.700.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	75.000.000	74.496.590
		Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	75.000.000	74.496.590
		Pameran Dagang Lokal	75.000.000	74.496.590
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	60.650.000	57.550.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60.650.000	57.550.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.650.000	57.550.000
Total Sasaran 2			610.650.000	606.746.590
3	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	113.350.000	113.150.000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	113.350.000	113.150.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	113.350.000	113.150.000
Total Sasaran 3			113.350.000	113.150.000
4	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.051.630.044	4.753.361.343

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Tahun 2025	
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.355.000	26.290.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.755.000	8.740.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.800.000	8.750.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.800.000	8.800.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.155.645.044	3.935.267.394
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.146.845.044	3.927.017.394
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.800.000	8.250.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.000.000	140.741.257
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.000.000	140.741.257
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.200.000	67.200.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000	67.200.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.930.000	541.663.076
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.540.000	59.593.076
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.390.000	482.070.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.500.000	42.199.616
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.500.000	42.199.616
Total Sasaran 4			5.051.630.044	4.753.361.343
Total Keseluruhan			9.601.606.273	9.065.287.929
Sisa Anggaran (Silpa)				536.318.344
Persentase Serapan Anggaran				94,41%

Capaian realisasi anggaran belanja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Tahun anggaran 2025 adalah sebesar 94,41% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.601.606.273 dan realisasi sebesar Rp. 9.065.287.929. Sisa anggaran/ Silpa sebesar Rp. 536.318.344.

Selain anggaran belanja, pada tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan mengelola anggaran pendapatan melalui retribusi daerah yang terdiri dari Retribusi Kios dan Retribusi Pelayanan

Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.8. Realisasi Pendapatan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Kios	700.000.000	310.173.000	44,31
	Jumlah	700.000.000	310.173.000	44,31

Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran pendapatan adalah sebesar 77,54 persen dimana dari anggaran sebesar Rp. 700.000.000 terealisasi sebesar Rp. 310.173.000. Rendahnya realisasi ini disebabkan karena realisasi retribusi kios agak rendah yakni sebesar 44,31 persen. Hal ini disebabkan karena penetapan target retribusi kios yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan jumlah kios/los sebagai objek retribusi yang dikelola. Selain itu beberapa pedagang sebagai pengguna kios/los masih ada yang menunggak pembayaran retribusi. Sehingga diperlukan penyesuain target yang sesuai dengan jumlah Kios yang dikelola.

3.4. Analisis Efisiensi

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung penghematan anggaran dalam mencapai output kegiatan. Semakin sedikit anggaran untuk mencapai output maksimal berarti nilai efisiensi semakin tinggi, atau dapat dikatakan kalau rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian output kegiatan berarti penggunaan anggaran efisien. berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk tahun 2025.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74%	NA	Pake data 2023	3.825.976.229	3.592.029.996	93,89	
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	45,90%	NA	Pake data 2023	610.650.000	606.746.590	99,36	
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	18%	11,85%	94,79%	113.350.000	113.150.000	99,82	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB(74)	BB (71,27)	96,31%	5.051.630.044	4.753.361.343	94,10	

$$\text{Efisiensi} = (1 + x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \dots$$

Ket : Data PDRB Batu Bara Tahun 2025 belum diterbitkan oleh BPS

Tabel 3.10. Analisis Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Pake	93,89	NA
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	NA	99,36	NA
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	94,79	99,82	Efisien
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	96,31	94,10	Efisien

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 sasaran dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 - 2025.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.

Berikut beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja di Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara :

- a. Meningkatkan kapasitas produksi industri kecil menengah masih belum optimal.
- b. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah.
- c. Meningkatkan branding, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.

- d. Meningkatkan kualitas desain produk unggulan daerah
- e. meningkatkan pelayanan kemetrolagian daerah
- f. Menata dan memberdayakan sentra industri kecil menengah (IKM)
- g. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi industri kecil dan menengah potensial
- h. Melakukan penataan tempat berusaha pedagang kecil
- i. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat
- j. Meningkatkan kualitas manajemen usaha pedagang pasar dan informal
- k. Melaksanakan Pelatihan kerja berdasarkan Unit Kompetensi
- l. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- m. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- n. Fasilitasi Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
- o. Melakukan Pengukuran Produktivitas Tenaga kerja
- p. Fasilitasi Pelayanan Antar kerja
- q. Fasilitasi Perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
- r. Fasilitasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- s. Fasilitasi Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)
- t. Fasilitasi Penerbitan Perpanjangan IMTA
- u. Fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
- v. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.

Talawi, 10 Januari 2025
Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Batu Bara

Antoni Ritonga, S.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19690529 199303 1 005

FOTO FOTO DOKUMENTASI

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Operator Komputer



2. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



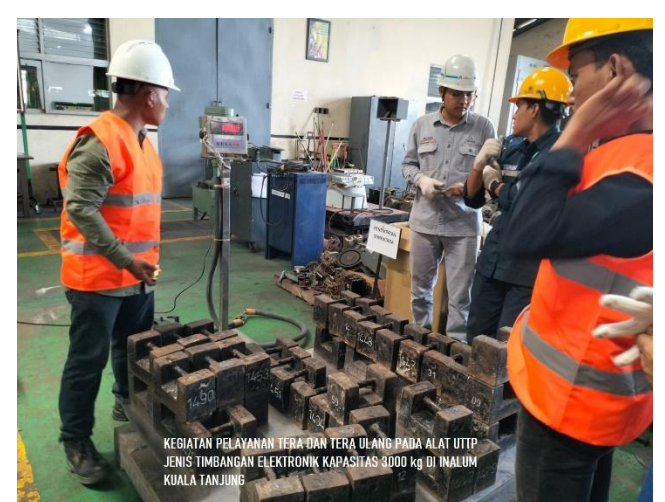
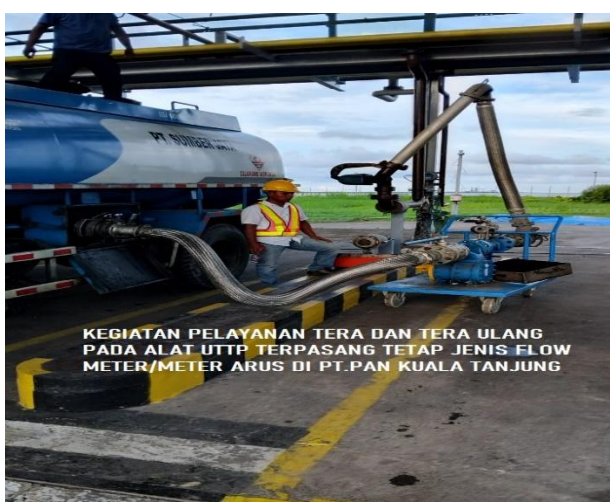
3. Rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten



4. Pelatihan IKM Pembuatan Briket Berbahan Baku Batok Kelapa



5. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur





6. Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)



7. Kegiatan Sidang Tera Ulang di Pasar Rakyat



8. Kegiatan Pembubuhan Cap Tanda Tera pada Alat Ukur



9. Kegiatan Pengawasan Barang Kena Cukai Illegal

